

Pernyataan Wabup Lom Lom Bikin Gaduh

Dari Halaman 1

yang secara identitas, sejarah, dan ideologi berbeda dengan Al-Washliyah.

"Lomlom seharusnya paham bahwa Al-Washliyah bukan NU, dan Nahdliyin bukan sebutan untuk warga Al-Washliyah. Ini bukan soal siapa lebih besar, tapi soal akurasi dan penghormatan terhadap identitas organisasi," ujar salah satu tokoh Al-Washliyah Sumut yang menolak disebutkan namanya.

Pernyataan Lomlom pun menimbulkan tanda tanya besar mengenai kapasitas dan pemahaman sebagai kader Partai Gerindra. Beberapa pihak bahkan mempertanyakan bagaimana sosok dengan pemahaman yang dinilai "keliru dan provokatif" bisa menduduki posisi strategis di partai besar.

"Gawat. Ini bukan sekadar salah ucap. Ini bisa memicu kegaduhan antar ormas Islam. Gerindra harus mengevaluasi kader seperti ini," ungkap Ketua DPD KNPI Kabupaten Deli Serdang, Muhammad Zaid Fahry.

Tetap Pada Pendirian

Pihak Alwashliyah dan Pemkab Deliserdang tetap pada pendirian masing-masing terkait aset tanah di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang.

Kedua belah pihak merasa masih berhak dengan aset yang ada.

Pihak Alwashliyah mengaku punya hak penuh atas lahan SMP Negeri 2 Galang karena sudah ada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan mereka, sementara Pemkab merasa juga masih berhak menguasai gedung karena itu aset mereka yang dibangun menggunakan APBD.

Pemkab menganggap tidak ada dasar mereka untuk meminjamkan lagi bangunan, apalagi menghobkannya kepada Alwashliyah.

Pihak merasa ada isi putusan terkait eksekusi area lahan SMPN 2 itu, termasuk yang dicekualikan untuk dieksekusi dari 35.000 m2 lahan yang ada. Hal ini lantaran dipergunakan sebagai sarana pendidikan.

Hal ini diketahui setelah perwakilan dari ribuan massa Alwashliyah diterima aspirasinya langsung usai melakukan aksi unjukrasa di kantor Bupati Deliserdang, Senin (26/5).

Saat itu perwakilan massa yang lebih banyak berbicara adalah petinggi Alwashliyah, Hardi Mulyono.

Hal yang ingin disampaikan didengar langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati, dr Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo didampingi sejumlah pejabat seperti Inspektur Edwin Nasution, Kadis Pendidikan Yudi Hil-mawan, dan Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum, Redwin.

Saat itu Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, juga ikut mendengarkan.

Hardi dalam kesempatan itu menyampaikan, Alwashliyah mengakui kalau gedung sekolah bukanlah milik Alwashliyah.

Namun jika memang tidak bisa untuk dipinjam pakaikan atau dihibahkan kepada Alwashliyah mereka meminta itu untuk diangkat karena mereka juga bisa untuk membangun.

Ia mengatakan, semua pihak harus menghor-

mati putusan Kasasi.

"Jangan suruh kami tinggalkan tanah kami. Kami tetap menyatakan itu tanah kami. Itu wakaf dan dosa, nggak boleh sejengkal pun (digeser). Kalau dikasih (gedung) alhamdulillah, kalau nggak dikasih (lah), akan kami bangun (kembali)," ucap Hardi.

Berulang kali ia menyampaikan, sebenarnya Alwashliyah punya harapan Pemkab bisa menghibahkannya kepada mereka.

Hal ini lantaran gedung selama ini mereka jadikan sekolah juga dan sudah ada ratusan pelajar yang memakai gedung tersebut.

Saat itu massa juga sempat menyampaikan kalau dulunya Alwashliyah juga sudah punya kesepakatan dengan mantan Bupati Deliserdang, almarhum Amri Tambunan, yang tidak lain adalah ayah dari bupati sekarang.

Saat itu Pemkab disebut memohon waktu selama 10 tahun untuk memindahkan sekolah.

Selain itu, perwakilan Alwashliyah meminta agar bupati bisa memikirkan anak-anak yang sudah memakai gedung sekolah itu, karena mereka juga semuanya adalah anak-anak Deliserdang.

Pada momen ini Bupati Asri tidak banyak berkomentar di depan para petinggi Alwashliyah.

Namun demikian disampaikan, mereka akan kembali mengumpulkan data-data untuk kembali mengajak pihak Alwashliyah berdialog kembali.

"Gak ada aturan Pemkab memberikan itu (gedung) diberikan pada Alwashliyah. Kami juga harus patuh pada aturan yang berlaku," kata Bupati Asri yang akrab disapa Aci.

Ia menegaskan, jika Pemkab tidak patuh pada aturan yang berlaku maka dianggap bisa berdampak pada pidana.

Kadis Pendidikan Deliserdang, Yudi Hil-mawan, membenarkan kalau sebelumnya Pemkab ada meminjam pakaikan gedung kepada Alwashliyah.

Tetapi ia mengatakan, dalam perjalanannya mereka kembali menilai kalau hal ini melanggar ketentuan yang ada.

Makanya atas dasar aturan, mereka pun mengeluarkan surat pembatalan pinjam pakai secara sepihak.

"Kami gak mau dipermasalahkan. Bangunan itu jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), itulah (sebabnya) kami membatalkan perjanjian pinjam pakai tersebut dan mengim-bau agar tidak ditempatkan lagi bangunan (isi surat kepada Alwashliyah). Aset Pemkab itu harus betul-betul wajib untuk dipertahankan," sebut Yudi.

Dibantu Inspektur, Edwin Nasution, dijelaskan, pada prinsipnya Pemkab tidak pernah bilang lahan itu lahan Pemkab.

Yang diakui adalah hanya gedung. Disampaikan saran dari BPK, sekolah itu harus difungsikan lagi.

"Nggak ada aturan kami untuk angkat itu (gedung). Kita juga harus memikirkan rasa keadilan untuk 325 siswa (anak didik SMP Negeri 2) karena mereka jauh (kalau dipindahkan)," kata Edwin.

Karena tidak ada titik temu, saat itu Hardi Mulyono pun menegaskan kalau mereka akan

mempertahankan aset itu sampai titik darah penghabisan.

Jika memang Pemkab tidak setuju (usul menghibahkan), ia mempersilahkan agar Pemkab menggugat mereka.

Ia mengatakan mereka akan siap menghadapi proses yang ada.

Ia juga meminta agar Pemkab melalui dinas pendidikan tidak lagi menyurati Alwashliyah untuk angkat kaki dari gedung yang ada.

Tumbangkan Pagar Pemkab

Massa Tumbangkan Pagar Kantor Bupati Aksi ribuan massa Alwashliyah di kantor Bupati Deliserdang sempat memanas, Senin (26/5).

Kejadian ini bermula saat beberapa massa menerobos pagar besi kantor bupati. Setelah itu pagar pun kemudian tumbang dan patah.

Melihat hal ini beberapa personil Satpol PP pun langsung siaga. Adu mulut pun langsung terjadi antara petugas dengan Satpol.

Selanjutnya massa pun mulai menerobos memasuki lapangan kantor bupati. Massa semakin emosi setelah salah satu perwakilan yang dianggap provokator diamankan. Melihat hal ini massa lainnya pun ikut bereaksi.

Tidak mau suasana langsung memanas, Waka-polresta Deliserdang, AKBP Juliani Prihartini pun langsung memerintahkan agar personil Satpol PP lainnya tidak terpancing.

Juliani pun berusaha keras untuk menenangkan suasana. Ia pun memimpai agar semua pihak bisa menahan diri.

"Mohon untuk tetap tenang dan damai ya. Semua untuk tetap tenang," kata Juliani.

Massa dari awal sudah meminta agar Bupati Deliserdang, dr Asri Ludin Tambunan untuk menemui mereka.

Meski sudah diteriaki untuk keluar, namun saat itu belum ada tanda-tanda bupati akan keluar.

"Kita sedang upayakan, tetap tenang," kata Juliani dengan pengeras suara.

Suasana kembali tertib setelah pimpinan aksi menenangkan anggotanya untuk tetap tenang.

Selanjutnya itu barulah kemudian massa kembali mundur.

Bupati dan Wabup Datangi Massa Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang, dr Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo mendatangi ribuan massa Al Washliyah yang melakukan aksi unjukrasa di kantor Bupati, Selasa 26/5.

Mereka datang setelah aksi unjukrasa memanas.

Saat itu sempat terjadi aksi lempar melempar dari massa kepada personil keamanan yang melakukan pengamanan.

Selain itu pagar kantor Bupati juga sudah sempat jebol diterobos massa.

Suasana baru mereda setelah Wakapolresta Deli Serdang, AKBP Juliani Prihartini ikut turun tangan menenangkan massa. dr Asri dan Lom-Lom keluar didampingi oleh Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana.

Mereka langsung mengarah ke tengah lapangan dan mendekati massa.

Dr Asri yang akrab disapa Aci ini sempat disorakin massa dengan berbagai kalimat. Ia pun hanya tetap diam di samping Kapolresta.(A-10)

3x24 Jam Wajib Minta Maaf

Dari Halaman 1

kemarin.

Pernyataan yang mengatakan bahwa yang demo ini bukan kader Washliyah. Dan pernyataan bahwa ini adalah 'Kabupaten Nahdliyyin' dianggap melukai hati berbagai elemen masyarakat di Sumut.

"Kita minta Wakil Bupati DS untuk mencabut pernyataan yang dianggap memecah belah umat yang sudah terjalin dengan baik. Dan kita meminta oknum Wakil Bupati DS agar meminta

maaf dalam waktu 3x 24 jam," tegas Ketua Pemuda Muslimin Indonesia Sumut Jonson Sih-aloho SHI didampingi Wakil Ketua Jon Masren Saragih, S.Pd, Khairul Umam, Senin (26/5) di Medan.

Ditambahkannya, tidak sepatasnya pejabat negara yang berbaju dinas mengatakan seperti itu.

"Secuilpun tidak mencerminkan perilaku sebagaimana layaknya seorang Wakil Bupati yang digaji rakyat. Brutal, provokatif dan seperti orang tak berpendidikan," tegas Jonson Sihalo. "Deliserdang adalah Kabupaten Nahdliyin.

Kami Tak Bergeming Sejengkalpun

Dari Halaman 1

kami lepaskan. Kami tidak akan bergeming. Tanah wakaf adalah amanah, bukan milik bebas pakai," kata Dedi saat dihubungi, Selasa (27/5).

Tanah seluas sekitar 35.500 meter persegi di Desa Jaharun B, Kecamatan Galang itu disebut telah lebih dari dua dekade digunakan Pemkab tanpa sewa. Dedi menyebut, bukannya berterima kasih, Pemkab justru mengingkari kesepakatan yang pernah dibuat bersama.

Ia menyebut, pada masa Bupati Deli Serdang sebelumnya, telah dilakukan kesepakatan pinjam pakai antara Dinas Pendidikan Deli Serdang dan PD Al Washliyah Deli Serdang. Bukti kesepakatan itu tertuang dalam surat resmi kedua pihak,

dan kegiatan belajar mengajar SMPN 2 Galang pun telah sempat dipindahkan dari tanah tersebut.

Namun kini, Pemkab justru kembali mengklaim dan meminta pengosongan bangunan yang dipinjamkan. Dua surat resmi dikeluarkan, masing-masing bertanggal 15 April dan 5 Mei 2025, yang isinya memberhentikan pinjam pakai serta memerintahkan pengosongan gedung sekolah.

"Pemkab tidak bisa begitu saja membatalkan secara sepihak. Ini bukan tanah milik Pemkab, tapi tanah wakaf milik Al Washliyah. Hukum wakaf jelas melindunginya," ujar Anggota DPRD RI ini.

Dedi pun mengingatkan, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta wakaf tidak boleh dialihkan, apalagi diambilalih

Menkes Kukuh Hapus Sistem Kelas BPJS

Dari Halaman 1

Keberadaan sistem kelas menurutnya melanggar prinsip sosial selayak setera.

"Jadi kita akan hilangkan definisi kelas. Karena kelas itu stigmatized. Kelas itu membedakan antara orang yang tak mampu kelas 3, orang yang

mampu kelas 1. Itu menurut saya melanggar prinsip sosial yang equality. Harusnya kelasnya sama. Samanya mana, yaitu KRIS tadi," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (26/5).

"Maksudnya prinsip gotong royong, maksudnya prinsip subsidi adalah orang yang bayar tinggi itu harusnya sama dengan orang yang enggak bayar tinggi," sambungnya.

Erik Pasaribu: Bertahun-tahun Jalan Kami

Dari Halaman 1

turun, jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang memaksa siswa berjalan kaki menembus medan berat, bahkan ada yang harus menempuh jarak jauh setiap harinya.

"Sudah sejak sekolah ini berdiri kita ajukan perbaikan akses jalan, tapi sampai sekarang belum juga ada tindakan. Sudah tujuh anggota DPRD Sumut datang, sudah diajukan proposal, tapi mana realisasinya," sesal Erik Firmansyah Pasaribu.

Dijelaskan Erik, Anggota DPRD yang telah datang memantau daerah tersebut sudah ada 7 orang, termasuk Delmeria Sikumbang dan Juliski Simorangkir.

"Mereka meminta proposal, dan proposal itu sudah diserahkan. Tapi apakah anak-anak sekolah butuh jalan atau butuh jalan? Sampai kini, tidak ada hasil nyata. Jalan masih tetap sama: becek, berlubang, dan penuh tanah merah," kata Erik, kecewa.

Lebih lanjut disampaikannya, bukan hanya SMAN 2 Tukka yang mengalami nasib buruk, akses jalan menuju SMA Negeri 1 Tukka tak

Kalau saudara-saudara kader Al Washliyah, silahkan baca, ini kabupaten nahdliyyin," teriak Lomlom, yang disambut lemparan botol air mineral dan umpatan para pengunjung rasa.

Lomlom sebagai Wakil Bupati dianggap tidak memiliki etika dan literasi yang baik dalam menyikapi aksi masyarakat.

Perlu dipahaminya, jabatan Wakil Bupati itu bukan jabatan preman. Lagipula, yang melakukan unjukrasa itu adalah warganya sendiri, warga yang mungkin memilih Lomlom pada Pilkada lalu. Dan yang pasti, mereka ini adalah warga yang membayar gaji seorang wakil bupati.(gnt)

tanpa persetujuan nazhir dan badan wakaf. Karena itu, ia menegaskan Al Washliyah tidak akan diam dan akan menggunakan segala jalur hukum untuk mempertahankan tanah tersebut.

"Kami sudah terlalu sabar. Sekarang kami berdiri untuk mempertahankan hak kami. Kalau Pemkab masih ngotot, silakan angkat saja gedungnya, tapi jangan pernah gunakan lagi satu jengkal pun tanah kami," tegasnya.

Ia juga menyebut, Mahkamah Agung pernah memutuskan bahwa Pemkab wajib membayar sewa atas pemanfaatan tanah itu. Namun hingga kini keputusan itu tak kunjung dijalankan.

"Bukan hanya soal hak, ini soal harga diri organisasi. Sudah saatnya semua pihak belajar menghargai wakaf dan tidak mempermainkan tanah milik umat," tutup Dedi.(A-10)

Budi mengatakan, BPJS Kesehatan sama konsepnya dengan pajak, di mana orang yang bayar pajak tinggi pun mendapatkan hak yang sama dengan yang bayar pajak lebih rendah.

"Sama seperti pajak, kita bayar pajak berapa pun, hak kita untuk dapat jalan, hak kita untuk akses taman, hak kita dapat fasilitas dari negara, itu sama," sambungnya. (cnni/js)

Ma'ruf Amin Sebut

Dari Halaman 1

nasih oleh Prabowo. Sebab, saat ini pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

"Berarti Presiden nanti akan segera mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Badan Pengembangan Ekonomi Syariah sebagai transformasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah," pungkasnya. (cnni/js)

APH Diminta Awasi

Dari Halaman 1

tersebut.

Nezar mengatakan, Walikota dan Wakil Walikota Medan Rico dan Zaki harus meminta kepada aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, jaksa, inspektorat, maupun KPK, turut serta mengawasi, agar menjadi supervisi pansel atas proses lelang jabatan tersebut.

"Agar proses-proses lelang tersebut transparansi dan terang benderang dan disaksikan oleh rakyat Kota Medan atas program 100 hari kerja Walikota Medan dan wakilnya," ungkap Anggota DPRD Sumut 2014-2019, dan sekarang menjabat menjadi Ketua PSI Sumut yang memiliki fraksi di Kota Medan.

Ia menyebutkan, ketika sudah disupervisi oleh APH, maka tidak akan ada lagi timbul fitnah di belakang hari, dan pastinya orang-orang yang lolos seleksi akan memiliki komitmen dalam membangun Kota Medan ke depannya. (A-10)



"Deli Serdang Milik Siapa?"

Dari Halaman 1

dihindari. Aksi damai berubah menjadi rusuh, pagar kantor bupati roboh, dan kepercayaan terhadap netralitas pemerintah daerah pun goyah. Yang lebih memprihatinkan, pernyataan itu membuka luka sosial yang selama ini mungkin tersebunyi: persoalan identitas, eksklusivisme keagamaan, dan kecenderungan sektarianisme dalam birokrasi lokal.

Netralitas Negara yang Diuji

Dalam sistem demokrasi, pejabat publik adalah pelayan seluruh rakyat, tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, suku, maupun organisasi masyarakat. Negara harus hadir sebagai ruang bersama yang inklusif, bukan sebagai milik eksklusif kelompok tertentu. Maka, ketika seorang pejabat menyatakan sebuah wilayah administratif sebagai milik kelompok tertentu – dalam hal ini "Kabupaten Nahdliyyin" – maka ia telah merusak prinsip dasar kenegaraan: netralitas.

Ucapan Wakil Bupati bukan sekadar kekeliruan retorik, tetapi menandakan kegagalan dalam memahami tanggung jawab seorang pemimpin publik. Ia bukan sekadar wakil dari partai atau organisasi keagamaan yang mengusunginya, tetapi representasi formal dari semua warga Deli Serdang, baik yang Nahdliyyin, Muhammadiyah, Al-Washliyah, maupun yang non-muslim sekalipun.

Pernyataan seperti itu bukan hanya tidak elok, tetapi berbahaya. Ia dapat memicu polarisasi sosial, memecah belah masyarakat, dan menimbulkan kecurigaan bahwa birokrasi tidak lagi bekerja berdasarkan hukum dan keadilan, melainkan berdasar ikatan primordial.

Politik Identitas di Tingkat Daerah

Pernyataan Wakil Bupati juga mencerminkan gejala yang lebih luas: menguatnya politik identitas di tingkat lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak wilayah di Indonesia yang menghadapi ketegangan sosial akibat politisasi identitas keagamaan. Di berbagai pilkada, simbol-simbol keagamaan dan organisasi massa sering dijadikan alat mobilisasi politik. Sering kali, yang dikorbankan adalah semangat kebersamaan dan kepercayaan antarwarga.

Deli Serdang, sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat keberagaman yang tinggi, tentu memerlukan kepemimpinan yang bijak dan mampu menjaga keseimbangan sosial. Pernyataan sepihak semacam itu dapat menjadi pemantik konflik horizontal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Bukankah sejarah bangsa ini dibangun dari semangat "Bhinneka Tunggal Ika"?

Ketika organisasi kemasyarakatan seperti Al-Washliyah, yang juga memiliki sejarah panjang dan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan dan keagamaan di Sumatera Utara, merasa terpinggirkan atau disepelekan, maka yang terjadi bukan hanya protes terhadap kebijakan, tetapi kehilangan rasa memiliki terhadap negara.

Ujian Kebhinnekaan

Pernyataan Wakil Bupati telah menjadi ujian bagi demokrasi dan kebhinnekaan kita. Ia menyingkap betapa rapuhnya konstruksi sosial jika tidak dijaga dengan narasi kebersamaan. Indonesia bukan hanya milik satu kelompok atau organisasi, sebagaimana Deli Serdang bukan hanya milik Nahdliyyin, Muhammadiyah, atau Al-Washliyah. Ia adalah rumah bersama, tempat bertemunya berbagai aspirasi, keyakinan, dan latar belakang.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus mampu menjadi penengah dan pemersatu, bukan malah menambah sekat-sekat sosial yang dapat merusak harmoni masyarakat. Seorang pemimpin harus paham bahwa setiap kata dan sikapnya memiliki dampak sosial-politik. Menjaga tutur kata adalah bagian dari menjaga keutuhan sosial.

Klarifikasi dan Rekonsiliasi

Krisis ini mestinya segera direspons dengan bijak. Klarifikasi dan permintaan maaf dari Wakil Bupati bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab etis atas ketegangan yang telah ditimbulkan. Lebih dari itu, perlu ada langkah nyata untuk merajut kembali kohesi sosial yang mulai retak.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, bersama DPRD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, perlu menggelar forum dialog lintas organisasi keagamaan dan kemasyarakatan untuk memastikan bahwa daerah ini tetap menjadi ruang inklusif bagi semua warganya. Momentum ini harus dijadikan evaluasi untuk memperkuat nilai-nilai netralitas birokrasi, demokrasi partisipatoris, dan semangat toleransi.

Pendidikan Politik yang Dewasa

Insiden ini menjadi pelajaran penting bahwa politik lokal tidak boleh dikotori oleh fanatisme sempit. Masyarakat pun perlu semakin cerdas dalam melihat dan memilih pemimpin, bukan karena afiliasi agamanya, tetapi karena komitmennya pada nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan pengabdian tanpa diskriminasi.

Sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan media lokal memiliki peran strategis untuk menyebarkan pendidikan politik yang sehat dan kritis. Masyarakat harus dibekali kesadaran bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dirayakan dalam semangat persatuan.

Pernyataan Wakil Bupati mungkin lahir dari spontanitas emosional atau keterbatasan perspektif, tetapi dampaknya nyata. Ia menohok rasa keadilan, mengguncang kepercayaan publik, dan mencederai nilai-nilai kebangsaan.

Kini, yang paling penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Apakah dengan amarah, atau dengan kedewasaan politik dan semangat memperbaiki? Deli Serdang harus kembali menjadi milik semua. Milik rakyat, bukan milik satu kelompok. Sebab ketika kekuasaan hanya untuk segelintir, maka demokrasi kehilangan makna, dan republik ini kehilangan arah.